

RINGKASAN

Analisis Penyusunan Nota Keuangan APBN 2026 Pada Direktorat Jenderal

Anggaran: Diki Ardiansyah, NIM D42221676, Tahun 2026, Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Bapak Rizki Fajar Pradipta, S.E. (Pembimbing Lapang), Bapak Sugeng Hartanto, S.E., M.M. (Dosen Pembimbing Magang).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran meliputi Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Sistem Penganggaran, dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Pelaksanaan magang dilakukan di Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dit. PAPBN) yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang penyusunan APBN, termasuk penyusunan dan pemutakhiran Nota Keuangan APBN. Direktorat Penyusunan APBN terdiri atas Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi ke dalam enam kelompok kerja sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 124 Tahun 2024.

Pemutakhiran Nota Keuangan APBN 2026 merupakan proses strategis yang dilakukan untuk memperbarui asumsi makroekonomi, target pendapatan negara, alokasi belanja negara, serta pembiayaan anggaran berdasarkan perkembangan

kondisi ekonomi terkini dan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Proses ini dilaksanakan melalui alur kerja yang melibatkan koordinasi lintas tim kerja, pengumpulan dan pengolahan data fiskal, serta penyusunan bahan analisis yang mendukung kebijakan fiskal pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan alur pemutakhiran Nota Keuangan APBN 2026 pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain kompleksitas koordinasi lintas unit, keterbatasan standarisasi alur kerja yang terdokumentasi secara rinci, serta dinamika perubahan data dan asumsi ekonomi yang memerlukan penyesuaian cepat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan prosedur kerja melalui penyusunan flowchart atau diagram alur yang lebih sistematis, penguatan koordinasi dan komunikasi antarunit, serta optimalisasi pemanfaatan data dan sistem informasi penganggaran. Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas proses pemutakhiran Nota Keuangan APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.